



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : **SAMUDDIN ABDUL KADIR**
- Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
- NHK : **249785**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.060.000.000**

- Tanah Seluas 621 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1650 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **100.000.000**

- MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **114.235.000**

D. SURAT BERTHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **315.709.827**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.589.944.827**

III. HUTANG Rp. **----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **2.589.944.827**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.